

Komunikasi dalam Proses Kesatuan dan Persatuan Bangsa

Medelina KUSHARWANTI*

PENDAHULUAN

Apabila suatu masyarakat dibuatkan jalan-jalan baru, diberi surat kabar, radio, teater-teater atau buku-buku pada waktunya tampaklah akibat-akibat yang besar. Perubahan timbul dalam cara berpikir orang banyak dan pada apa yang mereka hargai.¹ Alinea ini sebenarnya hanya hendak menunjukkan bahwa sarana-sarana komunikasi memiliki "daya yang cukup ampuh" di dalam mendatangkan perubahan-perubahan pada masyarakat, melalui pesan-pesan yang disampaikan. Baik perubahan pola pikir maupun tingkah laku. Alat-alat tersebut mampu menawarkan dan memperkenalkan ide-ide baru beserta keuntungan-keuntungannya. Lewat radio para petani diperkenalkan kepada metode pertanian modern yang akan memberikan hasil lebih memuaskan dibandingkan dengan metode pertanian tradisional yang selama ini dikenal. Terdorong keinginan memperoleh hasil yang lebih baik, para petani kemudian mengganti cara-cara bertani mereka dengan cara modern seperti yang diperkenalkan lewat radio. Melalui layar televisi masyarakat dapat diajak mengagumi budaya suatu suku yang sebelumnya sama sekali tidak dikenal. Dari rasa kagum tersebut lama-kelamaan akan timbul rasa memiliki dan sekaligus menimbulkan rasa cinta terhadap budaya yang ditampilkan.

Sistem komunikasi yang demikian memungkinkan terjadinya koordinasi dari kesatuan-kesatuan geografis yang luas. Menyebarkan kesadaran akan aspek-aspek kehidupan yang tidak merupakan bagian dari pengalaman pembaca, pendengar atau pirsawan. Kemajuan-kemajuan di bidang komunikasi

*Staf CSIS.

¹Ithiel de Sola Pool, "Komunikasi dan Pembangunan," di dalam Myron Weiner (ed.), *Moder-nisasi Dinamika Pertumbuhan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980, hal. 45.

telah mengubah konstelasi masyarakat menjadi suatu kesatuan organik yang hidup dinamis. Keadaan yang terjadi di suatu tempat akan berpengaruh di tempat lain pada waktu yang hampir bersamaan, ide yang berkembang di suatu tempat akan dapat dengan cepat dijalankan ke tempat lain sesuai dengan yang dikehendaki. Keadaan demikian berlaku di Indonesia, ide-ide atau pesan-pesan pemerintah dapat disebarakan ke seluruh rakyat di tanah air melalui sarana-sarana komunikasi untuk mendapatkan perubahan atau menciptakan keadaan yang diinginkan. Termasuk di dalamnya penyebaran ide dan pesan pemerintah untuk mewujudkan kesatuan persatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tulisan ini bertujuan membahas sejauh mana komunikasi yang telah dibangun pemerintah mampu menyampaikan pesan-pesannya secara tepat dan mengena kepada masyarakat dalam rangka usaha menciptakan iklim bagi kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembahasan terhadap pembangunan komunikasi pemerintah ini menyangkut pembangunan sarana-sarana komunikasi, teknik-teknik penyampaian pesan dan yang paling pokok adalah bagaimana pemerintah membentuk pesan-pesannya, sehingga pesan-pesan tersebut mampu menumbuhkan motivasi, mengubah pola pikir atau tingkah laku masyarakat seperti yang diharapkan.

PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Ada pandangan yang beranggapan bahwa bangsa Indonesia lama, mungkin sudah ada sejak jaman pra-sejarah. Dalam masa tertentu terutama dalam masa kerajaan agung Sriwijaya dan Majapahit, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tampak jelas terwujud sebagai suatu kesatuan politik yang besar.² Namun setelah penjajah datang, dengan memecah-belah, mereka berhasil menaklukkan seluruh Kepulauan Indonesia beserta dengan penduduknya guna dijadikan sumber kemakmuran bagi negara asal.

Dimulai dengan pendirian Budi Utomo (1908) benih-benih kesadaran berbangsa dan bernegara mulai ditumbuhkan. Lewat pendidikan mulai ditanamkan kecintaan terhadap bangsa dan tanah tempat lahir. Ide-ide ini disosialisasikan lewat surat-surat kabar yang terbit pada waktu itu. Tahun 1928, jawaban terhadap tantangan usaha pemecahbelahan semakin dipertegas. Kaum muda mencetuskan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan sumpah ini ditetapkan identitas bangsa yang melahirkan bangsa In-

²Lihat, Harsya W. Bachtiar, "Integrasi Nasional Indonesia: Beberapa Catatan," *Analisa*, No. 11, Tahun 1984.

donesia dalam arti etnis dan politis, merupakan wujud kesatuan dan persatuan bangsa, tanah air dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Konsep kesatuan dan persatuan bangsa yang tampak nyata pada tahun 1928 tersebut, ternyata menjadi alat yang berguna bagi pendobrakan belenggu penjajahan di tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan sampai sekarang, gerakan kebangsaan Indonesia semakin ditingkatkan untuk mempersatukan suku-suku bangsa di kepulauan kita menjadi suatu bangsa yang besar. Proses mempersatukan penduduk, budaya serta daerah yang merupakan unsur terpenting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semakin direkatkan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah hidup serta sumber hukum bagi seluruh rakyat. Di samping itu strategi pembangunan nasional yang tertuang di dalam GBHN merupakan rangkaian program di segala bidang yang memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dan dioperasikan melalui tahapan-tahapan Pembangunan Lima Tahun. Perangkat-perangkat tersebut dipakai di dalam pembentukan negara Indonesia yang di dalam melakukan tugasnya menganut aliran pikiran integralistik, maksudnya negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan mengatasi segala golongan dan perseorangan serta mempersatukan diri dengan segala lapisannya.³ Pemikiran ini sejalan dengan pendapat Ernest Renan, bahwa pengertian bangsa (nation) adalah solidaritas besar yang terbentuk oleh perasaan yang timbul sebagai akibat-akibat pengorbanan-pengorbanan yang telah diadakan bersama dan kesediaannya untuk melaksanakannya lagi di masa depan, bagi bangsa Indonesia ini berarti pula mencakup kesediaan untuk mencapai cita-cita bersama yaitu masyarakat adil-makmur baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Dengan demikian kesatuan dan persatuan dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak terbatas hanya berdasarkan pada kesamaan ras, bahasa, agama atau kepentingan serta batas-batas geografis, namun berdasarkan kesamaan yang tumbuh akibat pengorbanan masa lalu, masa kini dan yang akan datang. Hal lain yang mengikat dan mendorong kesatuan dan persatuan bangsa ialah keinginan memenuhi tugas-tugas negara seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga dapatlah dipahami, bahwa usaha membina kesatuan di dalam berbangsa dan bernegara bukan hanya ditopang oleh kerukunan antar suku, ras, umat beragama serta persatuan geografis belaka, namun perlu ditunjang oleh kemantapan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan. Kelemahan pada salah satu bidang tersebut, akan merupakan ancaman bagi ke-

³Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Penerbit Siguntang, 1959), hal. 114.

satuan dan persatuan bangsa. Andaikata terdapat kerapuhan dalam bidang ideologi, niscaya negara akan dengan mudah dimasuki berbagai ideologi dan paham asing yang merasuki seluruh masyarakat, yang akhirnya akan menimbulkan berbagai penggolongan dan pengelompokan masyarakat atas dasar ideologi atau paham yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain. Oleh sebab itu konsepsi Wawasan Nusantara yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial-budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan disertai doktrin Ketahanan Nasional sebagai kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara adalah langkah-langkah untuk memperkuat persatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perisai menanggulangi usaha-usaha pemecahbelahan. Kebijakan dan strategi yang telah disepakati bersama ini dengan sendirinya harus dipahami oleh seluruh rakyat, sekaligus disertai konsekuensi untuk melaksanakannya. Namun demikian kondisi yang menunjang diterimanya kebijakan-kebijaksanaan tersebut harus dipersiapkan, antara lain dengan sosialisasi konsep-konsep dan kebijakan-kebijaksanaan tersebut, agar masyarakat benar-benar dapat menerima dan sekaligus merasa terikat untuk ikut serta melaksanakannya.

KOMUNIKASI SEBAGAI ALAT

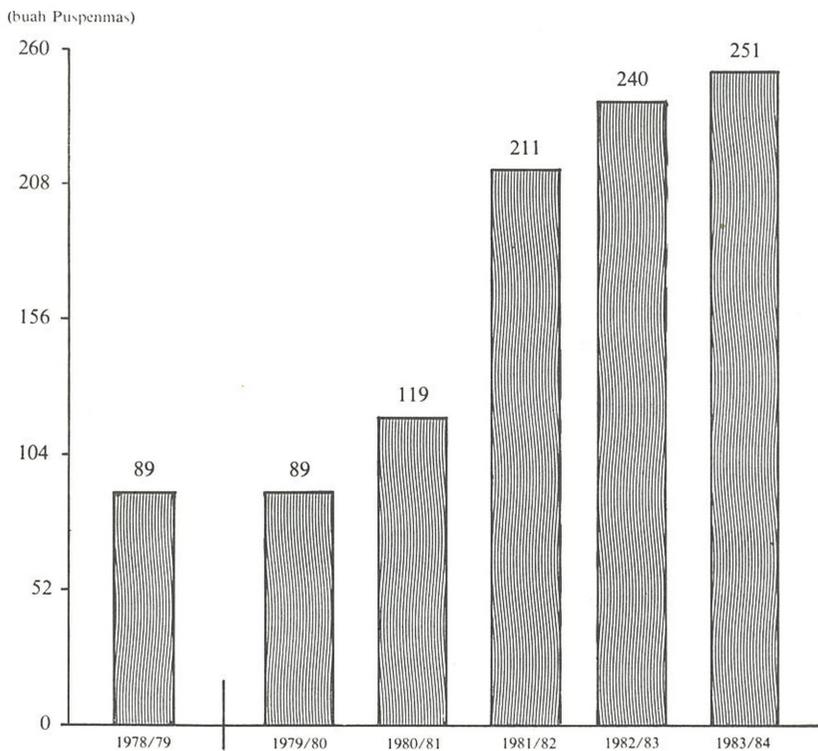
Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat merupakan salah satu alat sosialisasi dan juga cara untuk mendapatkan keadaan yang diharapkan. Kebutuhan ini semakin mendesak, dengan adanya kenyataan-kenyataan yang muncul bahwa selama 40 tahun merdeka, bangsa Indonesia belum mampu mewujudkan semua harapan dan cita-citanya secara penuh. Masih banyak persoalan yang hadir sebagai perintang. Misalnya di dalam negeri sendiri kesatuan dan persatuan yang merupakan kunci pokok dalam tata hidup berbangsa dan bernegara masih terus terancam dengan persoalan-persoalan yang bersumber dari pertikaian-pertikaian yang disebabkan perbedaan suku, ras maupun agama. Perbedaan-perbedaan ideologi yang muncul dalam masyarakat sering terasa mengganggu ketenteraman hidup bersama, belum lagi masalah pertambahan penduduk, kepadatan dan penyebarannya, serta kurang memadainya kesempatan kerja yang tidak jarang menimbulkan gejolak dan kerawanan sosial. Masalah ketergantungan dari luar, terutama dari negara-negara maju yang berupa pasaran, impor kapital/teknologi serta konflik-konflik yang diakibatkan oleh teknologi yang memperbesar daya singgung sehingga pertentangan kepentingan tidak dapat diakomodasikan. Persoalan-persoalan ini perlu dipahami oleh masyarakat dengan proporsi yang sebenarnya, lewat informasi-informasi yang jelas dan benar, sehingga dapat diharapkan munculnya peran-serta masyarakat untuk turut memikirkan dan

mencari jalan ke luar dan bukannya memperumit permasalahan. Menurut Klaus Knorr, kekuatan nasional meliputi tiga unsur, yaitu motivasi, kemampuan fisik dan pengelolaan. Dengan komunikasi motivasi dapat dibangun, ditingkatkan sebagai sikap mental yang ulet dan tangguh, berlandaskan pada perjuangan dan kesediaan berkorban.

Untuk mendapatkan sikap-sikap yang demikian ini Pemerintah Indonesia berupaya dengan memperbanyak serta mempersering pesan-pesan dalam bentuk informasi-informasi maupun himbauan yang disampaikan lewat surat kabar, televisi, radio maupun melalui media-media yang lain. Sebagai indikator, jumlah Pusat Penerangan Masyarakat (Puspenmas) ditingkatkan dari

Grafik 1

PERKEMBANGAN JUMLAH PUSPENMAS 1978/1979 - 1983/1984



R E P E L I I A III

Sumber: Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang DPR 16 Agustus 1984.

89 buah pada tahun 1978/1979, menjadi 251 buah pada tahun 1983/1984. Dengan peningkatan ini diharapkan semakin banyak dan semakin kontinu penyampaian pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Penambahan dan peningkatan juga dilaksanakan pada jam siaran RRI dari 704 jam pada tahun 1978/1979 menjadi 1.442 jam pada tahun 1983/1984. Meskipun alokasi waktu untuk masing-masing bidang acara, tidak banyak mengalami perubahan kecuali pengurangan penyampaian berita dari 29% pada tahun 1978/1979 menjadi 25% pada tahun 1983/1984, dan penambahan pada acara kebudayaan dari 45% untuk periode 1978/1979 menjadi 50% pada periode 1983/1984, tetapi karena jumlah jam siaran secara keseluruhan ditambah, maka dengan sendirinya frekuensi penyiaran tiap-tiap bidang acara meningkat pula (lihat Tabel 1).

Tabel 1

JUMLAH JAM SIARAN RATA-RATA PER HARI
DARI SELURUH STASIUN PEMACAR RRI
SERTA IMBANGAN JENIS SIARANNYA, 1978/1979 - 1983/1984

Uraian	1978/79	Repelita III				
		1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
Jumlah jam siaran rata-rata per hari	704	704	706	709	729	1.442
Berita/penerangan	(29%)	(30%)	(25%)	(25%)	(25%)	(25%)
Pendidikan/agama	(19%)	(19%)	(20%)	(20%)	(20%)	(20%)
Kebudayaan/hiburan	(45%)	(44%)	(50%)	(50%)	(50%)	(50%)
Iklan/lain-lain	(7%)	(7%)	(5%)	(5%)	(5%)	(5%)

Sumber: Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang DPR 16 Agustus 1984.

Selain penambahan jumlah Puspenmas serta penambahan jam siaran RRI, maka jam siaran TVRI pun ditingkatkan pula, dari 24.302 jam pada tahun 1978/1979 menjadi 25.970 jam pada tahun 1983/1984. Peningkatan ini hanya sebesar 6,86%, tetapi dengan adanya kebijaksanaan penghapusan siaran iklan di TVRI maka jam siaran untuk bidang penerangan/berita, pendidikan/agama, hiburan/seni budaya dan lain-lain semakin bertambah pula.

Tabel 2

JUMLAH JAM SIARAN SERTA IMBANGAN JENIS SIARAN TVRI,*
1978/1979 - 1983/1984 (dalam jam)

Uraian	1978/79	Repelita III				
		1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
Jam siaran	24.302	24.302	25.719	25.719	25.965	25.970
Berita/penerangan	(22%)	(22%)	(22%)	(28%)	(28%)	(27%)
Pendidikan/agama	(23%)	(23%)	(23%)	(23%)	(23%)	(24%)
Hiburan/seni budaya	(45%)	(45%)	(45%)	(47%)	(47%)	(47%)
Iklan	(8%)	(8%)	(8%)	—	—	—
Lain-lain	(2%)	(2%)	(2%)	(2%)	(2%)	(2%)

* Jumlah jam siaran selama setahun dari seluruh stasiun TVRI.

Sumber: Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang DPR, 16 Agustus 1984.

Dengan pesan-pesan yang semakin dipersering tersebut, maka lewat acara-acara yang disajikan mass media diharapkan tumbuh kondisi yang menunjang munculnya partisipasi masyarakat dalam menghadapi semua problema yang timbul di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu pesan-pesan lewat media ini juga diarahkan bagi pembentukan sikap-sikap yang diinginkan pemerintah, yakni terpeliharanya keutuhan dan persatuan bangsa, dengan menumbuhkan rasa senasib secita-cita, menumbuhkan solidaritas nasional yang gemanya dapat dirasakan semua orang, serta usaha-usaha menarik partisipasi rakyat terhadap pembangunan dengan penerangan koperasi, penyuluhan pajak dan lain sebagainya. Dengan harapan agar pesan-pesan tersebut memiliki daya jangkau yang lebih luas, merata di seluruh tanah air dan segenap lapisan masyarakat, maka langkah-langkah yang diambil pemerintah adalah menambah jumlah stasiun pemancar dan kekuatan pemancar RRI serta TVRI, di samping program koran masuk desa.

Dari Tabel 3 dan 4 dapat dilihat perkembangan jumlah stasiun dan kekuatan pemancar RRI, penambahan jumlah stasiun pemancar untuk memperluas daya jangkau pesan-pesan pembangunan, disertai pula dengan peningkatan kekuatan pemancar agar pesan atau informasi yang disampaikan dapat diterima dengan terang, jelas dan baik oleh seluruh pendengarnya. Hal tersebut berlaku pula pada TVRI, dengan unit produksi keliling yang mulai

diadakan pada tahun 1981/1982 untuk menunjang perluasan daya jangkau pesan-pesan pemerintah yang disampaikan lewat acara-acara TVRI.

Tabel 3

PERKEMBANGAN JUMLAH STASIUN DAN KEKUATAN PEMANCAR RRI
1978/79 - 1983/84

No.	Uraian	1978/79	Repelita III				
			1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
1.	Stasiun penyiaran	49	49	49	49	49	49
2.	Stasiun pemancar	252	253	253	265	300	300
3.	Kekuatan pemancar	2.550	2.560	2.560	2.660	2.747	2.947

Sumber: Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang DPR 16 Agustus 1984.

Tabel 4

PERKEMBANGAN JUMLAH STUDIO, STASIUN PEMANCAR
DAN PENGHUBUNG TVRI, 1978/79 - 1983/84
(buah stasiun)

Jenis Stasiun	1978/79	Repelita III				
		1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
Stasiun penyiaran (studio)	9	9	9	9	9	9
Stasiun pemancar/penghubung	82	104	116	124	186	200
Unit produksi keliling	—	—	—	10	10	10

Sumber: Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang DPR 16 Agustus 1984.

Yang paling menyolok dari kesemuanya ini ialah Program Koran Masuk Desa. Dari Tabel 5 dapat terlihat, bahwa dari 5 propinsi yang dijangkau pada tahun 1978/1979 maka dalam kurun waktu lima tahun semua propinsi telah berhasil dijangkau. Ini menandakan bahwa pesan-pesan ataupun informasi dari pemerintah yang disampaikan kepada segenap masyarakat telah tersebar merata di seluruh tanah air, baik di kota-kota maupun di desa-desa.

Tabel 5

KORAN MASUK DESA, 1978/79 - 1983/84

Tahun	Jumlah Pelaksana Koran Masuk Desa (penerbit)	Jumlah Penerbitan Per Tahun (eksemplar)	Jumlah Daerah yang Dijangkau (propinsi)
1978/79	12	4.500.000	5
1979/80	22	6.000.000	8
1980/81	34	7.150.000	13
1981/82	43	15.652.000	22
1982/83	48	12.480.000	26
1983/84	50	8.675.000	26

Sumber: Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang DPR 16 Agustus 1984.

EFEKTIVITAS PESAN

Dari tabel dan penjelasan dapat diketahui bahwa selama lima tahun pemerintah telah berupaya mengadakan peningkatan sarana komunikasi, baik berupa peningkatan jumlah sarana komunikasi, intensitas komunikasi maupun perluasan daya jangkauan komunikasi. Kesemuanya ini diharapkan menjadi perangkat pendukung bagi tercapainya tujuan pemerintah, yakni menyampaikan pesan-pesan termasuk penanaman rasa kesatuan dan persatuan di kalangan masyarakat.

Sekarang setelah perangkat keras dipandang cukup memadai, kiranya diperlukan pula adanya suatu pengkajian apakah komunikasi pemerintah telah dilakukan secara efektif sehingga pesan-pesannya dapat diterima dengan baik dan memperoleh tanggapan sebagaimana yang diharapkan, apakah partisipasi masyarakat akan meningkat, atau dengan kata lain apakah pesan-pesan tersebut cukup komunikatif. Melalui mass media konsep kesatuan persatuan bangsa memang dapat diajarkan kepada seluruh penduduk di seluruh wilayah tanah air. Namun apakah kemudian masyarakat menerima dan berlaku sesuai dengan nilai yang terkandung dalam konsep tersebut? Untuk melihat seberapa jauh pesan-pesan tersebut mengenai sasaran atau tidak, di antaranya dapat dikaji dari apresiasi masyarakat terhadap pesan-pesan yang disampaikan baik melalui surat kabar, TV maupun radio.

Dari suatu penelitian tentang apresiasi masyarakat terhadap isi surat kabar di Indonesia, yang dilakukan oleh Lembaga Pers dan Pendapat Umum Pusat Jakarta tahun 1978/1979, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberitaan surat kabar ibukota yang dijadikan sampel, dilihat dari segi jenisnya lebih banyak didominasi oleh berita-berita politik yang menyangkut Sidang Umum MPR, sedang berita-berita yang menyangkut bidang ekonomi, sosial dan budaya boleh dikatakan sedikit sekali.
2. Pola pemberitaan jalannya Sidang Umum MPR bersifat monoton, sehingga dalam membaca surat kabar yang satu dan beralih ke surat kabar yang lain isinya tetap sama. Ada kesan bahwa semua surat kabar hanya menerima release resmi saja dari pemerintah terutama mengenai pernyataan-pernyataan.
3. Ada kesan bahwa selama Sidang Umum MPR pers lebih berperan sebagai pendukung tanpa reserve, tanpa berani memberikan ulasan atau pendapat yang bersifat mengkritik, walaupun dilakukannya secara konstruktif. Pers dalam menyajikan beritanya terutama dalam bentuk opini lebih mengikuti kehendak pemerintah, tidak berani mengkritik secara langsung dan andai-kata pers ingin mengkritik juga, terutama koran independen atau partai, maka biasanya mereka meminjam pendapat orang lain untuk ditampilkan sebagai fakta di dalam surat kabarnya. Kecuali itu suasana menjelang Sidang Umum MPR kurangnya menguntungkan bagi masyarakat untuk memanfaatkan surat kabar dalam usaha memberikan sumbangan pikiran berupa saran, pendapat atau kritik. Masyarakat pembaca dalam hal ini lebih banyak bersifat pasif atau sekedar mendukung saja apa yang dilakukan oleh pemerintah dan wakil-wakil mereka di DPR/MPR. Pers dalam memberikan partisipasinya perlu mendapatkan kesempatan melaksanakan fungsi kontrolnya. Partisipasi saja tanpa kontrol menjadikan pers kering dan gersang, keduanya harus saling mengisi dan menjalankan fungsinya.⁴

Adapun tanggapan (apresiasi) masyarakat terhadap materi pesan, tujuan dan nilai-nilai yang disiarkan melalui TVRI, dalam penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tahun 1978/1979, diperoleh kesimpulan antara lain:

"Bahwa isi acara TVRI maupun penyusunannya dalam program-program nampaknya masih terlalu terpusat di Jakarta, tidak mengherankan kalau orang-orang daerah terlalu berorientasi ke Jakarta, kurang tertarik pada masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya sendiri, karena informasi-informasi tentang daerah sendiri sangat kurang."⁵

Efektivitas pesan yang disampaikan lewat radio kepada masyarakat tercermin dari kesimpulan hasil penelitian tentang efektivitas radio sebagai media

⁴*Himpunan Ringkasan Hasil Penelitian Penerangan 1978-1979, 1979/1980* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Penerangan, 1982), hal.20.

⁵*Ibid.*, hal. 37.

penerangan, pendidikan dan hiburan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Afiliasi, Universitas Hasanuddin pada tahun 1978/1979:

”Dibanding dengan radio luar negeri, radio swasta niaga/Pemda, informasi RRI, masih berada pada skala tertinggi dalam memperkenalkan daerah lain di Indonesia. Mempertinggi kesadaran/ketahanan nasional, membantu memperbaiki kehidupan sehari-hari dan memperluas pengetahuan. RRI merupakan wahana pembinaan kesatuan nasional yang sangat berguna, di lain pihak ia juga dirasakan cukup membangkitkan rasa cinta kepada daerah sebab musik/lagu-lagu daerah yang sering disiarkan dapat dihayati oleh penduduk yang bersangkutan.”⁶

Dari hasil-hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa pesan-pesan pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat melalui surat kabar dan TVRI belum dapat memuaskan serta belum menjangkau macam pesan atau informasi yang dibutuhkan masyarakat secara penuh, terbukti dengan bermacam ungkapan yang menunjukkan adanya ketidakpuasan, mulai dari kesan terlalu dominannya pesan pemerintah dengan pembatasan atas keinginan mengemukakan pendapat dan kritik di surat kabar, informasi yang terlalu banyak terpusat di Jakarta dan lain sebagainya. Pernyataan-pernyataan yang mengandung rasa ketidakpuasan masyarakat tersebut tentu mempunyai sebab-sebab, di dalam masalah ini tentunya dikaitkan dengan komunikasi, inilah yang harus ditemukan untuk menutup kekurangan-kekurangan di dalam penyampaian pesan.

KOMUNIKASI MANUSIAWI

Yang perlu diingat dalam setiap proses komunikasi adalah, bahwa komunikasi bukan hanya menyangkut masalah fisik saja, dalam bentuk sarana, bahasa (lambang), cara retorik, maupun karakteristik sintaksis, namun juga berkaitan dengan masalah psikologis yang terdiri dari unsur-unsur efektivitas komunikasi, analisa isi serta psikologi individual.⁷ Pada dasarnya komunikasi adalah cara untuk menyebarluaskan kemajuan pikir dan tingkah laku, mempermudah usaha mempersatukan pikiran yang berbeda-beda dalam kelompok serta dipakai untuk meningkatkan intelegensia sebagai unsur dari pendidikan. Menurut Carl I. Hovland, komunikasi adalah proses di mana seorang insan (komunikator) menyampaikan perangsang (biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata-kata) untuk mengubah tingkah laku insan-insan lainnya (komunikan, sasaran).⁸

⁶*Ibid.*, hal. 46.

⁷Onong, U. Effendy (ed.), *Komunikasi dan Modernisasi* (Bandung: Penerbit Alumni, 1973), hal. 4.

⁸*Ibid.*, hal. 2.

Perubahan tingkah laku ini dapat berupa perubahan sistem nilai-nilai yang mengubah norma yang tidak berfungsi lagi dalam masyarakat, atau dapat pula berupa perianaman nilai-nilai baru yang membawa masyarakat ke arah kemajuan atau pada keadaan yang lebih baik. Kiranya inilah yang merupakan tujuan akhir dan bagian paling penting dari setiap proses komunikasi, yakni tanggapan (response) terhadap pesan-pesan yang telah disampaikan. Pada tingkat pertama tanggapan itu berupa perhatian dan pada tingkat selanjutnya menjadi proses perubahan tingkah laku. Jadi masalah komunikasi erat hubungannya dengan perubahan nilai-nilai dan sikap-sikap, dengan demikian pesan-pesan dalam setiap komunikasi harus terencana agar isinya mengandung nilai-nilai perubahan psikologis dan sosiologis. Dalam pengertian ini, maka dari seluruh unsur komunikasi, unsur pesan dan sasaran mendapat tekanan lebih menonjol,⁹ artinya dalam pembuatannya pesan tersebut diusahakan untuk sanggup menciptakan kondisi atau perubahan yang diinginkan masyarakat yang menjadi sasarannya. Demi mencapai hal ini maka perlu diterapkan model komunikasi yang manusiawi.¹⁰ Di dalam komunikasi ini disertakan analisa tentang orang-orang yang akan menerima pesan, dan hasilnya akan menentukan jenis komunikasi tersebut, yaitu komunikasi yang disesuaikan dengan keadaan sasarannya. Komunikasi manusiawi memandang bahwa masyarakat modern bukanlah masyarakat massa yang tanpa kepribadian, kehilangan norma dan nilai serta bebas dari kelompok-kelompok primer. Komunikasi manusiawi memandang bahwa pesan yang disampaikan juga harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi orang-orang yang menjadi sasarannya, serta merupakan suatu usaha mengurangi bentuk-bentuk organisasi yang sifatnya mekanis dan tidak teratur yang tak mampu memindahkan pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan cepat. Dalam pengembangannya bertujuan meningkatkan harkat kemanusiaan, membangun pergaulan hidup yang lebih bersifat kemanusiaan, dengan wujud yang integratif, konsultatif dan terbuka. Suatu komunikasi yang serasi pada dasarnya mencerminkan suatu situasi di mana komunikator dan komunikan mengerti satu sama lain, saling mempengaruhi dan bahwa hasil komunikasi akan memuaskan kedua belah pihak. Berangkat dari pendekatan tersebut maka pesan-pesan yang terkandung dalam setiap komunikasi akan mampu menda-tangkan perubahan yang dikehendaki, dengan contoh sederhana diumpamakan terdapat sikap saling curiga antara satu suku dengan yang lain di wilayah tanah air ini, maka setelah pesan-pesan disampaikan baik dalam bentuk penerangan, pendidikan, bahkan hiburan, diharapkan sikap saling curiga tersebut sedikit demi sedikit terkikis dan berganti dengan munculnya sikap saling menghargai, penuh toleransi serta kemauan untuk hidup bersama dengan damai.

⁹*Ibid.*, hal. 39.

¹⁰*Ibid.*, hal. 34.

Dari pengertian-pengertian komunikasi manusiawi, jelaslah untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang diharapkan segi pembentukan pesan serta pemahaman sasaran amat dipentingkan, sehingga terbentuk pesan yang komunikatif, namun dari apresiasi masyarakat dapat disimpulkan bahwa pesan-pesan disampaikan justru dengan mengabaikan segi-segi tersebut. Masyarakat hanya difungsikan sebagai obyek yang dijadikan sasaran berbagai pesan dan informasi, baik yang diarahkan bagi peningkatan integrasi, partisipasi sukarela, keterkaitan batin antar warga dan lain-lain. Dari apresiasi masyarakat tersebut tampak bahwa pendekatan psikologi individual maupun pendekatan sosio-kultural yang penetratif kurang diperhatikan, sedangkan segi politis dan teknis lebih dominan. Hal ini kelihatan misalnya dengan informasi yang terlalu banyak terpusat di Jakarta secara tidak langsung akan menimbulkan kesan bahwa daerah-daerah lain kurang mendapat perhatian, keadaan ini akan mengakibatkan munculnya keengganan masyarakat untuk ikut mendukung gagasan-gagasan yang dilontarkan pemerintah.

Apabila komunikasi diarahkan untuk menyampaikan pesan-pesan politik, strategi, pertahanan-keamanan yang pada intinya untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan di dalam berbangsa dan bernegara, maka pesan-pesan yang disampaikan harus dapat mempengaruhi pola pikir dengan memakai cara-cara yang halus, artinya tidak terlalu provokatif namun menyentuh kebutuhan masyarakat yang dijadikan sasaran pesan-pesan tersebut, atau untuk membuat agar orang-orang bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki, komunikasi harus diperkuat dengan pendekatan yang bersifat antar pribadi (personal), dengan memperhatikan kebudayaannya, sistem sosial dan kepribadian dari sasaran pesan. Pesan harus disesuaikan dengan sikap moral, lingkungan penerima dan disertai iklim yang menjamin kebebasan mengemukakan pendapat dan kritik membangun yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga terbentuk suatu dialog yang memberikan keseimbangan antara komunikator (pemerintah) dengan komunikan (masyarakat) dan menghasilkan komunikasi yang memuaskan kedua belah pihak sehingga akhirnya pesan-pesan yang disampaikan pemerintah tersebut diterima masyarakat berdasarkan kesadaran dan bukan atas dasar paksaan, dengan demikian pengendapan pesan-pesan tersebut akan mendorong munculnya perubahan tingkah laku (pola pikir) sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam pesan-pesan tersebut. Untuk mencapai hasil yang memuaskan diperlukan pula pertemuan pendapat antara masyarakat dan pemerintah yang dicapai baik dalam tulisan di mass media maupun lewat lembaga-lembaga negara.

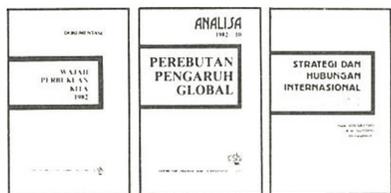
Perhatian yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat sebagai pesan telah ditunjukkan oleh RRI di dalam menyampaikan pesan-pesannya, ini terbukti dengan hasil penelitian tentang apresiasi masya-

rakat terhadap siaran RRI memberikan hasil yang positif. Pesan-pesan yang disampaikan disesuaikan dengan kondisi/keadaan sasaran, misalnya dengan dimasukkannya berita-berita daerah yang sesuai dengan interaksi kelompok serta bertalian pula dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan psikologi individual.

PENUTUP

Dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa maka tugas komunikasi adalah menyebarkan pesan-pesan. Sebagian bersifat langsung melalui kontak yang lebih leluasa dan sebagian lagi melalui usaha-usaha meningkatkan intelegensi serta membangun jenis pergaulan hidup yang lebih bersifat kemanusiaan. Komunikasi dapat lebih efektif jika dilandasi kesadaran bahwa masalah yang hakiki adalah bahwa semua orang berhak menangani segala sesuatu yang menyangkut kehidupannya sendiri. Kesepakatan untuk hidup berbangsa dan bernegara dalam kesatuan dapat disosialisasikan dan dipesankan dengan cara-cara komunikasi yang memperhatikan faktor-faktor kemanusiaan, dengan menanamkan kesan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab dan urusan setiap pribadi masyarakat Indonesia, bukan hanya cita-cita pemerintah atau impian para pemimpin. Dalam kondisi yang demikian masyarakat adalah obyek sekaligus subyek yang dinamis dan memiliki nilai sosial dan kultural yang harus diperhatikan di dalam setiap penyampaian pesan. Pemerintah perlu menciptakan iklim yang sehat dalam kehidupan pers maupun mass media yang lain dengan memberikan keseimbangan antara penyampaian pesan-pesan dan informasi dengan penampungan ide maupun aspirasi masyarakat sebagai cerminan kehidupan demokrasi sesuai dengan amanat pasal 28 UUD 1945.

Pesan-pesan pemerintah boleh disampaikan setiap waktu, ideologi dapat diajarkan secara kontinu dan merata, program-program mass media bisa disatukan dengan cita-cita kesatuan ideologi dan pers dapat ditugasi menggelorakan semangat pengabdian dan memperkuat kesatuan dan persatuan, namun tanpa komunikasi dengan pendekatan interpersonal yang persuasif, tanpa penghargaan terhadap kritik, serta mengabaikan sasaran sebagai individu dengan latar belakang sosio-kulturalnya yang khas tampaknya sulit membuahkan perubahan tingkah laku dan kondisi seperti yang diharapkan, yang berarti dapat mempersulit usaha-usaha sosialisasi kesatuan dan persatuan bangsa.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa buku-buku dan terbitan berkala:

BUKU-BUKU

Berbagai buku baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, hasil penulisan staf CSIS mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.

ANALISA

Majalah bulanan, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Harga per eks Rp 750,— langganan setahun (12 nomor) Rp 9.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp 6.750,—

THE INDOONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulanan berbahasa Inggris, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan-paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp 1.000,—, langganan setahun (4 nomor) Rp 4.000,—, untuk Mahasiswa Rp 3.200,—

DOKUMENTASI

Kumpulan clipping berbagai surat kabar/ bulletin secara sistematis mengenai masalah-masalah tertentu.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:
BIRO PUBLIKASI — CSIS
CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
 Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 s/d 356535

Untuk menunjang kegiatan pengkajian, CSIS juga menyediakan PERPUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN dan BIRO INFORMASI DAN DATA — CSIS
 Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 - 35

